



Fuad Rizal
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Director of Finance & Risk Management

To
Sukukholders
Garuda Indonesia Global Sukuk Limited
\$500,000,000.00 Trust Certificate due 2020
(ISIN:XS1238157181)

Jakarta
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

May, 19th 2020
GARUDA/JKTDF/20275/ 2020
ANNOUNCEMENT/PENGUMUMAN

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Pusat: Registered Office
Garuda Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 46A
Jakarta 10110
Indonesia

Kantor Manajemen/Management Office
Management Building, Garuda City
Soekarno-Hatta International Airport,
Tangerang 15111 – Indonesia
P.O BOX 1004 TNG BUSH

Phone +62-21-25601306
SITA Code JKTD
Website garuda-indonesia.com

Dear Sir/Madam,

Yth. Bapak/Ibu,

Holders of the Sukuk shall be referred to as the "Sukukholders"; and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. shall be referred to as the "Company".

Para pemegang Sukuk akan disebut sebagai "Pemegang Sukuk"; dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".

- Garuda is pleased to launch today a consent solicitation exercise in relation to the Sukuk
- The key terms of the Proposal include a 3-year maturity extension and a cumulative consent fee of up to 125bps for votes in favour received prior to 1 June 2020
- A Committee representing 28% of the Sukukholders has indicated their intention to vote in favour of the Proposal
- The Company is in active and advanced discussions to secure government support in the form of financing to ensure it remains a going concern

Garuda pada hari ini mengumumkan suatu permohonan persetujuan sehubungan dengan Sukuk

Ketentuan-ketentuan utama dalam Proposal termasuk suatu perpanjangan jatuh tempo 3 tahun dan suatu *consent fee* yang secara keseluruhan dapat mencapai 125bps untuk suara setuju yang diterima sebelum 1 Juni 2020

Komite yang mewakili 28% Pemegang Sukuk telah menunjukkan niatnya untuk memberikan suara menyetujui Proposal

Perseroan tengah dalam pembahasan aktif untuk memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap beroperasi secara *going concern*

The/...



The COVID-19 pandemic has created an extremely challenging business environment for airlines globally, with the World Health Organization declaring the outbreak a pandemic on 12 March 2020. There have been border controls, lockdowns and travel restrictions imposed by various countries, including Indonesia, as a result of the COVID-19 pandemic. On 24 April 2020, the Government of Indonesia announced the suspension of all domestic passenger flights with effect from 25 April 2020, as a measure to curb the spread of COVID-19. The COVID-19 pandemic and the resulting restrictions on travel and imposition of lockdown measures have resulted in protracted volatility in domestic and international markets and may result in a global recession, with the airline industry being significantly affected. Compliance with these measures and the corresponding decrease in passengers and demand for air travel have resulted in a significant reduction in the number of flights operated by the Company, which in turn has adversely impacted the Company's operations, revenues, cash flows and profitability. The Company has had to reduce 83% of its flight frequency during April 2020 as compared with April 2019.

In addition, lower demand in the market has forced the Company to reduce its available seat kilometres ("ASKs") by 40% from 1 January 2020 to 30 April 2020, as compared with the same period in Fiscal 2019, with the number of passengers having decreased by 45% and the seat load factor by 15% during the same period. ASKs were reduced by 79% from 1.4 billion to 289 million in the Company's domestic operations on account of a decline in domestic passenger volume of approximately 95% in April 2020 as compared with April 2019. The Company also reduced its average fares significantly

Pandemi COVID-19 telah menciptakan suatu lingkungan bisnis yang sangat menantang bagi maskapai penerbangan di seluruh dunia, dengan World Health Organization menyatakan wabah tersebut sebagai suatu pandemi pada 12 Maret 2020. Berbagai negara telah mengadakan kontrol perbatasan, *lockdown* dan pembatasan perjalanan, termasuk Indonesia, sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Sebagai suatu langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19, pada 24 April 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan penumpang domestik yang berlaku sejak 25 April 2020. Pandemi COVID-19 dan pembatasan terhadap perjalanan serta pemberlakuan kebijakan *lockdown* yang disebabkan oleh pandemi tersebut telah mengakibatkan ketidakstabilan yang berlarut-larut di pasar domestik dan internasional, serta dapat mengakibatkan resesi global yang dapat mempengaruhi industri penerbangan secara signifikan. Kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dan penurunan terhadap jumlah penumpang serta permintaan perjalanan yang timbul karenanya telah mengakibatkan suatu penurunan yang signifikan dalam jumlah penerbangan yang dioperasikan oleh Perseroan, yang kemudian memberikan dampak buruk bagi operasi, pendapatan, arus kas, dan profitabilitas Perseroan. Perseroan telah mengurangi 83% dari frekuensi penerbangannya selama April 2020 dibandingkan dengan April 2019.

Selain itu, permintaan yang rendah di pasar telah memaksa Perseroan untuk mengurangi ketersediaan kursi per kilometer ("ASK") sebesar 40% dari 1 Januari 2020 hingga 30 April 2020, dibandingkan dengan periode yang sama pada Fiskal 2019, dengan jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 45% dan faktor muat kursi (*seat load factor*) menurun sebesar 15% dalam periode yang sama. ASK dikurangi 79% dari 1,4 miliar menjadi 289 juta dalam operasi domestik Perseroan karena suatu penurunan volume penumpang domestik

in/...

in response to weakening passenger demand. Various travel restrictions have led to a 95% decline in passenger traffic in the Company's international operations, in April 2020 as compared with April 2019. This significant decline in international passenger traffic has led to the Company decreasing ASKs for international operations by 89% in April 2020 as compared with April 2019. Lower ASKs have also reduced the capacity of cargo volumes by 70% in the Company's international operations in April 2020 as compared with April 2019.

sebesar sekitar 95% pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019. Perseroan juga mengurangi tarif rata-ratanya secara signifikan sebagai tanggapan terhadap melemahnya permintaan penumpang. Berbagai pembatasan perjalanan telah menyebabkan penurunan sebesar 95% terhadap lalu lintas penumpang dalam operasi internasional Perseroan, pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019. Penurunan lalu lintas penumpang internasional yang signifikan ini telah menyebabkan Perseroan mengurangi ASK untuk operasi internasional sebesar 89% pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019. ASK yang lebih rendah juga telah mengurangi kapasitas volume kargo hingga 70% dalam operasi internasional Perseroan pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019.

The operational condition of the Company has in turn impacted the Company's financial condition, with operating revenue decreasing by 89% in April 2020 compared with April 2019. The pandemic has also led to negative cash flows due to the increase in the Company's trade payables arrears by 47% or by US\$236 million, during the first quarter of Fiscal 2020 as compared with the last quarter of Fiscal 2019. In addition, the application of PSAK 73 (*Leases*) (effective for financial reporting periods beginning on or after 1 January 2020), means that the Company's operating leases will be treated the same as finance leases; with an asset being recorded on the balance sheet along with a corresponding liability from 1 January 2020. It is expected that as a result of PSAK 73 (*Leases*) (i) the Company's financial liabilities would have increased by approximately US\$3.2 billion, which will directly impact the Company's debt profile; and (ii) the Company's interest expense will increase by approximately US\$124 million, during the four-month period ended 30 April 2020.

Kondisi operasional Perseroan tersebut memberikan dampak pada kondisi keuangan Perseroan yang mengakibatkan penurunan pada pendapatan operasi sebesar 89% pada April 2020 dibandingkan dengan April 2019. Pandemi ini juga telah menyebabkan arus kas negatif karena peningkatan tunggakan utang dagang Perseroan sebesar 47% atau sebesar US\$236 juta, selama kuartal pertama Fiskal 2020 dibandingkan dengan kuartal terakhir Fiskal 2019. Selain itu, penerapan PSAK 73 (*Leases*) (yang berlaku untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020), berarti bahwa sewa operasional (*operating lease*) Perseroan akan diperlakukan sama dengan sewa pembiayaan (*finance lease*); dengan aset dicatat di neraca bersama dengan suatu liabilitas terkait sejak 1 Januari 2020. Diperkirakan bahwa sebagai akibat dari PSAK 73 (*Sewa*) (i) liabilitas keuangan Perseroan akan meningkat sekitar US\$3,2 miliar, yang secara langsung akan berdampak pada profil utang Perseroan; dan (ii) beban bunga Perseroan akan meningkat sekitar US\$124 juta, selama periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2020.

In/...

In response to this situation, the Company has been taking measures to ensure the well-being of its staff and customers while managing liquidity proactively in the face of the uncertainty that the airline industry is currently facing. Amongst other measures, the Company has implemented pay cuts ranging from 10% to 50% for all employees. To date, this cost reduction programme has saved approximately US\$6 million and enabled the Company to reduce weekly cash costs, required to maintain its operations, to approximately US\$46 million. As of 30 April 2020, the Company's cash balance was approximately US\$150 million, most of which is restricted (margin deposits etc.) and cannot be freely used.

The Government of Indonesia has indicated in its public statements that it continues to support the Company's efforts to remain as a going concern during this time. In addition, the Company is in active and advanced discussions to secure government support in the form of financing to ensure it remains a going concern.

On 29 April 2020, the Company announced it would assess all its options to remain a going concern, in particular in relation to its outstanding US\$500,000,000 Sukuk due on 3 June 2020 (the "Sukuk"). The Company retained PJT Partners as its financial adviser and Allen & Overy as its legal adviser to assist with this process, and asked for Sukukholders to organize and form a committee to facilitate discussions with its advisers..

Untuk menanggapi situasi ini, Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin kesejahteraan staf dan pelanggan Perseroan sembari mengelola likuiditas secara proaktif saat diperhadapkan dengan ketidakpastian yang tengah dihadapi oleh industri penerbangan saat ini. Antara lain, Perseroan telah menerapkan pemotongan gaji mulai dari 10% hingga 50% untuk seluruh karyawan. Hingga saat ini, program pengurangan pengeluaran ini telah menghemat sekitar US\$6 juta dan memungkinkan Perseroan untuk mengurangi biaya tunai mingguan, yang diperlukan untuk menjalankan operasinya, menjadi sekitar US\$46 juta. Per tanggal 30 April 2020, saldo kas Perseroan adalah sekitar US\$150 juta, yang sebagian besar dibatasi (margin deposit, dll.) dan tidak dapat digunakan secara bebas.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan kepada publik bahwa Pemerintah Indonesia terus mendukung upaya Perseroan untuk beroperasi secara *going concern* selama masa ini. Selain itu, Perseroan tengah dalam pembahasan aktif untuk memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap beroperasi secara *going concern*.

Pada tanggal 29 April 2020, Perseroan mengumumkan bahwa Perseroan akan mempelajari seluruh opsi untuk tetap beroperasi secara *going concern*, khususnya terkait dengan Sukuk US\$500.000.000 yang akan jatuh tempo pada 3 Juni 2020 ("Sukuk"). Perseroan telah menunjuk PJT Partners sebagai penasihat keuangannya dan Allen & Overy sebagai penasihat hukumnya untuk membantu proses ini, dan meminta Pemegang Sukuk untuk menyusun dan membentuk suatu komite untuk memfasilitasi diskusi dengan para penasihatnya

An/...

An ad-hoc committee of Sukukholders (the "Committee") has formed, holding in aggregate approximately 28% of the Sukuk, and is being advised by Clifford Chance. Following discussions with the Committee, the Company is pleased to launch today a consent solicitation exercise in relation to the Sukuk (the "Proposal").

The Committee has indicated to the Company that (subject to client and other approvals) each member of the Committee intends to vote in favour of the Proposal in respect of their respective holdings of the Sukuk.

A meeting of Sukukholders will be held on 10 June 2020 to vote on the Proposal – 10 June 2020 being the last date subsequent to which the Sukuk will be in default.

The key terms of the Proposal include a 3-year maturity extension and a covenant holiday until operations return to a level similar to a pre-COVID situation. While the structure and details of government support are still under discussion, the Proposal provides for the fact that if this support were to come in the form of debt, that debt would not mature prior to the new Sukuk maturity in June 2023.

In particular, the Proposal includes a cumulative consent fee of up to 125bps for votes cast electronically and in favour of the Proposal, including an early consent fee of 75bps payable to eligible Sukukholders that vote electronically in favour of the Proposal on or before 1 June 2020, in addition to a consent fee of 50bps payable to such eligible Sukukholders. Votes cast by eligible Sukukholders electronically and in favour of the Proposal after 1 June 2020 but on or prior to 8 June 2020 will only receive a consent fee of 50bps. Any consent fees will be paid only upon

Komite *ad-hoc* dari Pemegang Sukuk ("Komite") telah terbentuk, yang secara keseluruhan memegang sekitar 28% Sukuk, dan dinasihati oleh Clifford Chance. Setelah berdiskusi dengan Komite, Perseroan pada hari ini meluncurkan suatu permohonan persetujuan (*consent solicitation exercise*) sehubungan dengan ("Proposal").

Komite telah mengindikasikan kepada Perseroan bahwa (tunduk pada klien dan persetujuan lainnya) setiap anggota Komite berniat untuk memberikan suara setuju terhadap Proposal sehubungan dengan kepemilikan Sukuk masing-masing..

Rapat Pemegang Sukuk akan diadakan pada 10 Juni 2020 untuk memberikan suara terhadap Proposal - 10 Juni 2020 adalah tanggal terakhir yang setelahnya Sukuk akan ada dalam posisi cedera janji.

Ketentuan-ketentuan utama dalam Proposal termasuk suatu perpanjangan jatuh tempo 3 tahun dan *covenant holiday* hingga operasi kembali pada tingkat yang serupa dengan situasi pra-COVID. Walaupun struktur dan perincian dukungan pemerintah masih dalam tahap pembahasan, Proposal mencantumkan fakta bahwa jika dukungan ini datang dalam bentuk utang, utang tersebut tidak akan jatuh tempo sebelum jatuh tempo Sukuk yang baru pada Juni 2023.

Secara khusus, Proposal menyertakan *consent fee* yang secara keseluruhan dapat mencapai 125bps untuk suara yang diberikan secara elektronik dan menyetujui Proposal, termasuk *early consent fee* sebesar 75bps yang harus dibayarkan kepada Pemegang Sukuk yang memenuhi syarat yang memberikan suara secara elektronik untuk menyetujui Proposal pada atau sebelum 1 Juni 2020, sebagai tambahan terhadap *consent fee* sebesar 50bps yang harus dibayarkan kepada Pemegang Sukuk yang memenuhi syarat tersebut. Suara yang diberikan oleh Pemegang Sukuk yang memenuhi syarat

successful completion of the consent solicitation (and subject to the settlement conditions set out in the Consent Solicitation Memorandum).

In addition, the Company intends that the periodic distribution amount in respect of the Sukuk which would have been payable on 3 June 2020 will be paid upon the successful completion of the consent solicitation.

The Board of the Company would like to thank the Committee for their assistance and support and recommends that other Sukukholders vote in favour with early acceptance.

secara elektronik dan menyetujui Proposal setelah 1 Juni 2020 namun pada atau sebelum 8 Juni 2020 hanya akan menerima *consent fee* sebesar 50bps. Setiap *consent fee* hanya akan dibayarkan setelah penyelesaian yang berhasil dari permohonan persetujuan (dan tunduk pada persyaratan penyelesaian yang dicantumkan dalam *Consent Solicitation Memorandum*).

Selain itu, Perseroan berkehendak agar jumlah distribusi berkala sehubungan dengan Sukuk yang semula harus dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2020 untuk dibayarkan setelah penyelesaian yang berhasil dari permohonan persetujuan.

Dewan Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Komite atas bantuan dan dukungannya dan menganjurkan agar Pemegang Sukuk lain memberikan suara setuju dengan penerimaan awal.

Yours faithfully/
Hormat Kami
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DIRECTOR OF FINANCE & RISK MANAGEMENT/
DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO

